

**ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Lima Desa Di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**



**Skripsi
(Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Savarita Pitri

1451010249

Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Lima Desa Di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi
(Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dosen Pembimbing I : Evi Ekawati, S.E., M.Si
Dosen Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.SAk**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2018 M**

ABSTRAK

Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Desa Kecamatan Natar, masih terdapat adanya jalan yang rusak dan tidak adanya pembuatan sumur gali. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan. Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada lima desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada lima desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Dalam langkah menganalisis data yaitu mengoleksi data, merangkum data, menyajikan data, menarik kesimpulan.

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar daripada tiga bidang lainnya. Menurut islam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap
Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada Lima Desa Di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : Savarita Pitri

NPM : 1451010249

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 17 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Evi Ekawati, S.E., M. Si
NIP. 197602022009122001**

Agus Kurniawan, S.E., M.SAk

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.S.I
NIP: 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Lima Desa Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun oleh : **Savarita Pitri, NPM : 1451010249, Jurusan : Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 05 September 2018.**

TIM MUNAQASAH

Ketua : Drs. H. Nasruddin, M.Ag

Penguji 1 : Evi Ekawati, S.E., M.Si

Penguji 2 : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

Sekretaris : Yusuf Bachtiar, M.E.I

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Drs. Bahrudin, M.Ag.
NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Bandung, 2005, hlm.437

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Yang terhormat dan sangat kubanggakan kedua orang tuaku Bapak Suhadi dan Ibu Holijah yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada adikku tersayang Sabila Tahuro yang selalu memberikan dukungan penuh atas pendidikanku.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan tahun 2014 terutama kelas C yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
4. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh kedua orang tua yang bernama Savarita Pitri. Lahir di Natar, Lampung Selatan pada tanggal 17 Mei 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suhadi dan Ibu Holijah. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008,
2. SMP Negeri 22 Bandar Lampung, Bandar Lampung lulus pada tahun 2011,
3. SMA Negeri 15 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2014,
4. Pada tahun 2014 menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dapat belajar dan terus belajar serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H.Moh Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

3. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
4. Evi Ekawati, S.E.,M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Agus Kurniawan, S.E.,M.Sak selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lin.
8. Aparatur pemerintahan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti.
9. Teman dekatku Risky Aprilian Syahputra S.E, Arfan Ridhoni S.E, yang telah menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku tersayang Thalia Nurulita S.Pd, Devi Rusalia S.E, Dempri Meliya S.E, Dwi Endriyani S.E, Eni Erviana S.E, Rizki Ratna Dita Sapitri, yang selalu menyemangati dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat seperjuangan khususnya kelas C, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penelitian. Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian selama ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern.



Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis

Savarita Pitri
NPM.1451010249

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Populasi dan Sampel	17
H. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen.....	22
1. Kosep Manajemen Secara Umum.....	22
a. Pengertian Manajemen.....	22
b. Fungsi Manajemen	24
2. Manajemen dalam Konsep Islam	29
a. Pengertian Manajemen.....	29
b. Dasar Hukum Manajemen.....	30
c. Fungsi Manajemen	30
3. Pengukuran Kinerja.....	36
B. Dana Desa	39
1. Pengertian Dana Desa	39
2. Alokasi Dana Desa	39

C. Pembangunan Desa	44
1. Pengertian Pembangunan Desa	44
2. Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Ekonomi	56
3. Pembangunan dalam Ekonomi Islam	59
4. Indikator-indikator Pembangunan dalam Ekonomi Islam	64
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ...	74
C. Kondisi Masyarakat di Lima Desa Kecamatan Natar	114
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan	123
B. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL

	Halaman
1. Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2017	6
2. Total Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017	7
3. Total Pendapatan Desa Tahun 2017.....	7
4. Jumlah Populasi Penelitian	17
5. Jumlah Sampel Penelitian	20
6. Jumlah Penduduk Per Desa Tahun 2017	67
7. Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah	67
8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	68
9. Banyaknya SD Menurut Jenis Sekolah	69
10. Banyaknya SLTP Menurut Jenis Sekolah	69
11. Banyaknya SLTA Menurut Jenis Sekolah	70
12. Banyaknya Sarana Kesehatan	70
13. Kondisi Rumah	71
14. Kondisi Perekonomian Masyarakat tahun 2017	72
15. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Natar Kab.Lampung Selatan..	73
16. Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Hajimena	77
17. Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Hajimena	78
18. Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Hajimena	78
19. Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Hajimena	79
20. Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Hajimena	79
21. Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Pemanggilan.....	85
22. Realisasi Bidang I penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemanggilan ..	86
23. Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Pemanggilan	87
24. Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Pemanggilan.....	87
25. Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemanggilan...	87
26. Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Natar.....	93

27. Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Natar	94
28. Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Natar.....	95
29. Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Natar.....	95
30. Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Natar.....	95
31. Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Merak Batin	101
32. Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Merak Batin...	102
33. Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Merak Batin.....	103
34. Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Merak Batin	103
35. Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Merak Batin ...	103
36. Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Muara Putih.....	109
37. Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Muara Putih ...	110
38. Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Muara Putih.....	110
39. Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Muara Putih.....	111
40. Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Putih....	111
41. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	115
42. Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2013.....	118
43. Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017.....	118
44. Pola Konsumsi Masyarakat.....	120
45. Tingkat Perumahan Masyarakat.....	122

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara	1
2. Pedoman Dokumentasi.....	2
3. Surat Permohonan Pra Riset.....	3
4. Surat Izin Pra Riset.....	4
5. Surat Permohonan Riset.....	5
6. Surat Izin Riset	6
7. Kartu Konsultasi Skripsi	7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus pada Lima Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**”.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

¹ Peter salim dan Yeni salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English*, jakarta, 1999, hlm.61

2. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.²

3. Dana Desa

Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana Desa keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen.³

4. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.⁴

5. Ekonomi Islam

Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵

² Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2015, hlm. 1.

³ Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), hlm. 133

⁴ Riken Kalalo, Ronny Gosal, Josef Kairupan, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi Di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)*,

⁵ Mustafa Edwin Nasution EI. At, *Pengendalian Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 15

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan manajemen dana desa di Lampung Selatan dapat meningkatkan pembangunan yang kemudian ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Ada beberapa alasan penulisan memilih dan ingin membahas judul ini, diantaranya :

- a. Karena pengelolaan manajemen dana desa sangat penting untuk perkembangan pembangunan yang ada pada daerah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, oleh sebab itu peneliti akan memaparkan mengenai pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan yang telah dianggarkan sesuai dengan potensi, kondisi yang dikeluarkan oleh PPKAD Lampung Selatan.

2. Alasan Subjektif

- a. Karena judul tersebut sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, sehingga akan menambah literature dan wawasan tentang percepatan pembangunan suatu daerah.
- b. Karna penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, hal ini didukung tersedianya literature-literature yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang dibutuhkan oleh penulis sebagai referensi.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dan meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.⁶

Dengan berdasarkan pendekatan pembangunan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Daerah

⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika Jakarta, Jakarta, 1999, hlm. 14

⁷ Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika Jakarta, 2002, hlm. 3

otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan memperhatikan khususnya dan keragaman daerah melalui peningkatan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan sehingga dalam diarahkan untuk percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah melalui keuangan daerah. Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁹

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bagian dari pendapatan daerah adalah dana desa.

Dana desa merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,

⁸ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37

⁹ Badrudin Rudy, *Ekonomika Ekonomi Daerah*, UPP Stim YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm. 13

pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing-masing terutama fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁰ Selengkapnya total penerimaan dana desa di 5 desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2017

No	Desa	Dana Desa (DD)	Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
1.	Hajimena	Rp. 908.437.617	Rp. 545.062.570	Rp. 363.375.047
2.	Pemanggilan	Rp. 858.018.828	Rp. 514.811.297	Rp.343.207.531
3.	Natar	Rp. 934.684.185	Rp. 560.810.511	Rp. 373.873.674
4.	Merak Batin	Rp. 980.480.650	Rp. 588.288.390	Rp. 392.192.260
5.	Muara Putih	Rp. 858.885.225	Rp. 515.331.135	Rp. 343.554.090
Jumlah		Rp 4.540.506.505	Rp 2.724.303.903	Rp 1.816.202.602

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017.

Dari tabel diatas diketahui jumlah dana desa dari kelima desa tersebut berjumlah Rp. 4.540.506.505 yang diturunkan melalui II tahap. Yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke dua sebesar 40%.

Selanjutnya total penerimaan alokasi dana desa di 5 desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut :

¹⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, PT. Bumi Prakasa, Jakarta, 2010, hlm. 24

Tabel 2
Total Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017

No	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
1.	Hajimena	Rp. 463.897.688	Rp. 278.338.613	Rp. 185.559.075
2.	Pemanggilan	Rp. 437.150.740	Rp. 262.290.444	Rp. 174.860.296
3.	Natar	Rp. 468.822.217	Rp. 281.293.330	Rp. 187.528.887
4.	Merak Batin	Rp. 467.727.283	Rp. 280.636.370	Rp. 187.090.913
5.	Muara Putih	Rp. 437.342.698	Rp. 262.405.619	Rp. 174.937.079
Jumlah		Rp 2.274.940.626	Rp 1.364.964.376	Rp 909.976.250

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar tahun 2017.

Dari tabel diatas diketahui jumlah alokasi dana desa dari kelima desa tersebut berjumlah Rp. 2.274.940.626 yang diturunkan melalui II tahap. Yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke dua sebesar 40%.

Sedangkan jumlah pendapatan yang diperoleh desa dari hasil Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (BHP), Bantuan Provinsi, Bunga Bank adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Total Pendapatan Desa Tahun 2017

No	Desa	Total Pendapatan
1.	Hajimena	Rp. 1.388.501.167
2.	Pemanggilan	Rp. 1.308.669.568
3.	Natar	Rp. 1.417.006.402
4.	Merak Batin	Rp. 1.467.707.933
5.	Muara Putih	Rp. 1.316.353.380
Jumlah		Rp. 6.898.238.450

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketaui jumlah pendapatan dari ke lima desa di atas sejumlah Rp. 6.898.238.450.

Berkenaan dengan dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan.

Prinsip pemerataan lokasi dana dalam sistem pemerintah otonomi di Indonesia dewasa ini dilaksanakan dengan adanya sistem transfer pendapatan antar pemerintah dana desa dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk mencapai kemandiriannya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.¹¹

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.¹² Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi

¹¹ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2014, hlm. 15

¹² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 89.

lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha.¹³

Distribusi dalam ekonomi Islam telah ditentukan oleh Allah S.W.T sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (7)¹⁴

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa mencapai Rp. 1.300.000.000 – Rp. 1.500.000.000 per Desa untuk Kecamatan Natar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap

¹³ *Ibid.*, hlm.90.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.76.

kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah dengan adanya partisipasi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.¹⁵

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.

¹⁵ Haryati, Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, JOM FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas.¹⁶

Hal ini juga yang dialami oleh pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Desa Kecamatan Natar, masih terdapat adanya jalan yang rusak dan tidak adanya pembuatan sumur gali. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan manajemen dana desa daerah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam pembangunan. Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam**

¹⁶ Kalimandhanu, Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume Nomor, 2014 : 2008 - 2022

Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada lima desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada lima desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi desa

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelolaan desa dalam menjalankan program yang telah ada, dalam hal ini program alokasi dana desa guna meningkatkan pembangunan desa.

b. Bagi penulis

Adanya penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, civitas akademik, dan pengelola sekolah dalam hal kajian ilmiah yang berkenaan dengan alokasi dana desa dalam pembangunan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.¹⁷ Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

¹⁷ Cholid Nuroboko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1997) hlm. 1

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2

Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.¹⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.²⁰ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Kecamatan Natar. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dana desa.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antar

¹⁹ Noor Juiansyah, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta Kencana , 2013), hlm.34.

²⁰ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm.

unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²¹ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang bagaimana pengelolaan manajemen dana desa dalam percepatan pembangunan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang asli.²² Adapun data primer diambil dari hasil penelitian lapangan dengan cara interview dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain.²³ Untuk sumber data sekunder, penulis mengumpulkan data dari buku-buku ekonomi, dan literature-literature lain yang berkaitan seperti : artikel-artikel, majalah, jurnal penelitian, surat kabar, mencari info dari internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 58

²² M. Iqbal Hasan, *Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik*, PT. Bumi Aksara, Bandung, 2006, hlm.19

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar metodetchnik*, Tarsindo, Ed,7. Bandung, 2000, hlm.134

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data ini, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.²⁵ Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana *interview* tidak secara langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.²⁶ Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.²⁷ Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yayasan Pendidikan Fakultas Sikologi UGM, Yogyakarta, 2012, hlm.72

²⁵ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hlm.115

²⁶ Nasution, *Metodelogi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, hlm.64

²⁷ *Ibid.* Hlm.65

memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dana desa.

c. Metode Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi non partifasi, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang di observasi. Peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digenerasikan.²⁹ Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.³⁰ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel 4
Jumlah Populasi Penelitian

No.	Desa
1.	Hajimena
2.	Pemanggilan
3.	Natar
4.	Merak Batin
5.	Muara Putih

²⁸ I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, edisi 1), hlm.52

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.206

³⁰ *Ibid.*, hlm. 130

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³¹ Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi agar lebih mudah melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³²

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *sampling non random* atau *sample nonprobabilitas* yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau element populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.³³ Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposif sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengolah data maka, maka penulis tidak menggunakan data kesecara keseluruhan untuk diolah.

Tetapi, untuk objektifitas data maka penulis menggunakan perwakilan sampel setiap desa yaitu aparatur desa dan tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat. Untuk aparatur desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala BPD sedangkan untuk, tokoh masyarakat dalam penelitian ini mengambil dua orang tokoh masyarakat yang dapat menjadi tempat bertanya dan tempat

³¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 109

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, bandung, 2009, hlm. 116

³³ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 2*, Bumi Aksara, Jakarta,2005, hlm.91

meminta nasehat mengenai pengelolaan dana desa. Karena kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1), Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. Sedangkan untuk bendahara desa karena bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Sampel ini diambil karena perencanaan program dana desa merupakan hasil kesepakatan antara aparatur desa dengan tokoh masyarakat, oleh karena itu sampel diambil dengan data sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Sampel Penelitian

No.	Desa	Jumlah Aparatur Desa	Jumlah Tokoh Masyarakat
1.	Hajimena	4 orang	2 orang
2.	Pemanggilan	4 orang	2 orang
3.	Natar	4 orang	3 orang
4.	Merak Batin	4 orang	2 orang
5.	Muara Putih	4 orang	2 orang
Jumlah		20 orang	11 orang

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 31 orang responden.

H. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpul melalui beberapa tahap diatas, peneliti didalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. *Data Collection* (Mengkoleksi Data)

Hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit dan belum bermakna, catatan lapangan yang berupa huruf desa, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih semerawut, yang tidak dapat dipahami.

b. *Data Reduction* (Merangkum Data)

Reduksi data adalah proses transformasi. Mereduksi data berarti “merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.” Dalam kaitan ini penulis menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga menyimpulkan data.

c. Data Display (Menyajikan Data)

Dalam kaitan ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

d. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, ketertarikan, pola-pola, alur sebab atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut menjadi umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Konsep Manajemen Secara Umum

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *namus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi *managere* menangani.³⁴ Pengertian manajemen berasal dari kata *to the manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.³⁵

Andrew F. Sikula mengungkapkan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan

³⁴ Usman Hunaini, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, Bumi Aksara, 2008 hlm.5.

³⁵ Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.1

untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.³⁶

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁷

Menurut Baldron mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan.³⁸

Selanjutnya menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan dengan Baldron yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia mencapai untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian pengertian yang sama dengan

³⁶ *Ibid.*, hlmn 3

³⁷ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta , 2004, hlm.54

³⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, hlm. 21.

manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.³⁹

Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.⁴⁰

b. Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Pemimpin dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari⁴¹:

³⁹ *Ibid.*, hlm.22

⁴⁰ George R Terry Alih Bahasa Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.4

⁴¹ Ricky W Griffin, Ronald J Ebert, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 2007.hlm.166

1) Perencanaan (*Planning*)

Louis A. Alien menyebutkan perencanaan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴² Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko mengemukakan bahwa perencanaan adalah⁴³ :

- a) Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi
- b) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dana standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan yang selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan organisasi. Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah⁴⁴ :

- a) Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti kerananya sulit pula direncanakan.

⁴² Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Keuangan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.42.

⁴³ Rahardjo Adisamita, *Op. Cit*, hlm.22-23

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 23

- b) Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c) Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

2) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994 : 21) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut⁴⁵ :

- a) Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
- b) Mencegah kekeliruan
- c) Memperbaiki efisiensi
- d) Mewujudkan ketertiban pekerjaan
- e) Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
- f) Menggambarkan prestasi yang maksimal
- g) Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan

⁴⁵ Rahardja Adisasmita, *Op. Cit.*, hlm. 127

Seringkali fungsi kontrol ini diperaktekan secara salah, karena kurang mengerti apa maksudnya. *Contolling* artinya membimbing pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan. Ini tidak sama artinya dengan memberi perintah atau komando, yang banyak dilakukan oleh para pengawas. Demikian pula dengan kontrol bukan berarti mencari-cari kesalahan orang lain, akan tetapi kontrol bertujuan mengembalikan segala sesuatu kejalan yang benar, seandainya terlihat ada penyimpangan.⁴⁶

3) Organisasi (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhan.⁴⁷ Philip Senznick mengungkapkan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal, eksternal, dan selalu dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif. Selanjutnya Drs. Soekarno K. organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja.⁴⁸

⁴⁶ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.143

⁴⁷ Malayu Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm.118

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.120

Menurut Cyril Soffer organisasi adalah persekutuan/perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian kerja dimana pekerjaan (yang terdapat dalam organisasi tersebut) dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas/pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil.⁴⁹

4) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.⁵⁰ Fungsi pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan yakni⁵¹ :

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.91

⁵⁰ Malayu Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm.41

⁵¹ Subeki Ridhotullah dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2015, hlm. 1-3

2. Manajemen dalam Konsep Islam

a. Pengertian Manajemen

Definisi manajemen dalam Islam tidak jauh dari pembahasan ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah S.W.T. menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nabi dan Rasul akhir zaman.⁵² Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Sunnah. Selain itu juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tertentu. Berbeda dengan manajemen konvensional ia merupakan sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata, dan tidak bersumber pada petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komperhensif, dan syarat kebenaran.⁵³

Menurut Stonner, ia mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet mendefinisikan sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang

⁵² Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.28

⁵³ *Ibid.*, hlm.28

lain.⁵⁴ Dengan manajemen manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan.⁵⁵

b. Dasar Hukum Manajemen

Allah S.W.T. berfirman mengenai dasar hukum adanya manajemen dalam Q.S. Ash-Shaf ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.⁵⁶

c. Fungsi Manajemen

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya *Manajemen Syariah* adanya kesamaan dalam fungsi manajemen syariah yaitu : perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Namun menurut Didin Hafidhudin dalam bukunya manajemen syariah dalam praktek terdapat perbedaan dari empat fungsi manajemen Islam yaitu : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), penggerak (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*,

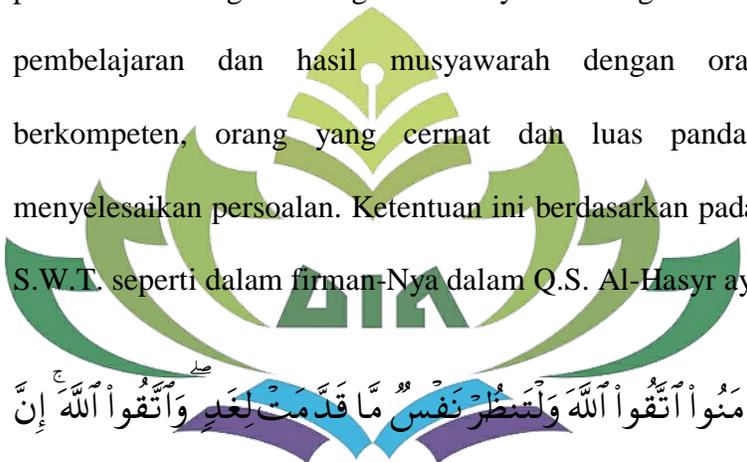
⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 29

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Bandung, 2005, hlm.440

⁵⁷ Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Op. Cit*, hlm. 235

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Yang sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasi perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁵⁸ Dalam Islam, konsepsi perencanaan dengan berbagai variasinya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan. Ketentuan ini berdasarkan pada petunjuk Allah S.W.T. seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵⁹

Selanjutnya berdasarkan pada petunjuk Allah S.W.T. seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. Yunus ayat 3 :

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.79

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.437

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
 الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?⁶⁰

Perencanaan yang baik mendukung tiga hal mendasar yaitu : tujuan dirumuskan dengan jelas, perhitungan dan pertimbangan kebijakan, realistis (perencanaan dapat dilaksanakan).⁶¹

2) Pengorganisasian (*planning*)

Menurut Terry, istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagian bagian-bagian terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Istilah ini kemudian diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu,

⁶⁰ *Ibid*, 166

⁶¹ M. Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung Pustaka Setia, 2010, hlm.109

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁶² Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam Islam :⁶³

- a) Struktur kepemimpinan
- b) Wewenang dan tanggung jawab
- c) Konsepsi syura (musyawarah)
- d) Pendelegasian

Berdasarkan penjelasan teori diatas Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S Ash-Shaff ayat 4 sebagai berikut :



Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang hidup saling bekerja sama dan berorganisasi dengan baik seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh dan tidak mudah untuk dihancurkan.

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah fakta sosial yang tidak dapat dihindarkan untuk mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam suatu

⁶² Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Op. Cit*, hlm. 91

⁶³ *Ibid*, hlm. 92

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.440

masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, memotifasi munculnya kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat, yakni dengan menunjukan seseorang yang dipercaya mampu memimpin dan memberikan petunjuk atas segala persoalan kehidupan.

Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat 2:

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah S.W.T. dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik.⁶⁵

Islam mengenalkan konsep pengorganisasian dan pentingnya seorang pemimpin dalam masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. dalam sabdanya: tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas tanah dimuka bumi ini, kecuali salah seorang mereka menjadi pemimpin”. Dalam hadis diriwayatkan: ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkan salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm.243

⁶⁶ *Ibid*, hlm.246

Fungsi kepemimpinan baru dapat dijalankan dalam sebuah masyarakat, jika telah terpenuhi 3 unsur utama berikut ini: adanya kumpulan masyarakat, terdapat tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama, dan terdapat seseorang yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota masyarakat yang akan membantunya merealisasikan tujuan utama.⁶⁷

4) Pengawasan (*controlling*)

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu menyampaikan amanah yang diembannya, berupa jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.⁶⁸

Allah S.W.T. Berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila adil, sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.⁶⁹

⁶⁷ Ibid, hlm.128

⁶⁸ Ibid, hlm.180

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.69

Fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan dari kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan menurut *fayol* adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaiki dan mencegah agar tidak terulang kembali.

3. Pengukuran Kinerja



Robert Simons menyebutkan *performance measurement system* membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau prestasi sebuah organisasi, dibutuhkan suatu ukuran atau kriteria sebagai indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitas dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Di samping itu Anthony dan Young mmeberikan tiga kriteria pengukuran organisasi publik yaitu : (1) *Process measures*, (2) *Result measures* (pengukuran hasil), (3) *Social indicator* (indikator sosial). Berikut ini akan dibahas pengukuran proses dari pengukuran hasil :

a. *Process Measures* (Pengukuran Proses)

Pengukuran proses (dapat pula disebut dengan pengukuran produktivitas) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi. Perbedaan yang mendasar antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses adalah ; pengukuran hasil berorientasi pada hasil akhir dari kegiatan, sedangkan pengukuran proses berorientasi pada alat atau cara yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan.

Pengukuran proses berhubungan erat dengan pertanggungjawaban individual didalam membantu untuk mencapai tujuannya. Dalam hubungannya dengan pengawasan, maka pengukuran proses berkaitan dengan cara dalam melakukan pengawasan, yaitu : dengan melakukan pemeriksaan yang terdiri tiga tahapan yaitu : tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap laporan.

b. *Result Measures* (Pengukuran Hasil)

Pengukuran hasil dilakukan dengan maksud menghindari kesulitan dalam pengukuran indikator sosial. Pengukuran hasil mencoba mengekspresikan output dalam hubungannya dengan tujuan organisasi, sehingga dengan pengukuran hasil dapat kita ekspresikan tujuan organisasi secara terukur (*measurable*). Dalam hubungannya dengan pengukuran hasil

pengawasan adalah yang berhubungan dengan laporan hasil pemeriksaan, apakah laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan suatu gambaran yang objektif tentang unit kerja yang diperiksa, dengan mana laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat memuaskan pimpinan organisasi yang memberikan penugasan atau yang memberikan perintah, maupun pimpinan unit kerja yang diperiksa sebagai pelanggan, sehingga dapat membantu pimpinan untuk mengukur efektivitas organisasinya.

Selanjutnya LAN RI dan BPKP memberikan penjelasan tentang indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yaitu : indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcomes*), indikator manfaat (*benefit*), dan indikator dampak (*impact*) berikut mengenai penjelasan indikator diatas :

- (1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan akan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia,, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundangan dan sebagainya.
- (2) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik.
- (3) Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung).

(4) Indikator manfaat adalah sesuatu kegunaan yang berkaitan erat dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

(5) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.⁷⁰

B. Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷¹

2) Alokasi Dana Desa

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 (d) dan Ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

⁷⁰ Rahardja Adisasmita, *Op. Cit.*, hlm. 32

⁷¹ Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁷² Dibagi untuk setiap desa secara proporsional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 43 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 92 Ayat 2 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen.⁷³ Pengelolaan ADD mengacu pada asas :

1. Asas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
2. Asas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi dana Desa proporsional. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya

⁷² Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1 dan 4.

⁷³ Chabib Soleh, Heru Rocmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung, Fokus Media, 2014, hlm.230

ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.⁷⁴

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁷⁵

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Deaa pasal 97 ayat 2.

⁷⁵ Chabib Soleh, Heru Rocmansjah, *Op. Cit*, hlm.62

kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.⁷⁶

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dari 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggara pemerintah desa dan BPD seperti : biaya operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Dari 70% alokasi dana desa dipergunakan untuk masyarakat seperti : pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengetaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa. BUMDes, kelompok usaha lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna,

⁷⁶ *Ibid*, hlm.16

linmas dsb.⁷⁷ Sedangkan mekanisme pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.⁷⁸

- a) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b) Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat di sertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Pencairan tahap ke dua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggung jawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dilampirkan dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.63

⁷⁸ *Ibid*, hlm.19

- 3) Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.⁷⁹

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

⁷⁹ Riken Kalalo, Ronny Gosal, Josef Kairupan, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi Di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)*,

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.⁸⁰

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.⁸¹

⁸⁰ Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomer 3, 2015.

⁸¹ Priyo Sambodo, *Implementasi Dana Bantuan Pt. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, 2014.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini.⁸²

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

⁸² Ni Made Ayu Andriani, Dr.Dra.Joyce. J. Rares, M.Si, Drs. Gustaaf Buddy Tampi, M.Si, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow.*

2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiaitan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik

sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
- 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat .
- 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.

- 6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
 - 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
 - 6) Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
 - 7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa

untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDes, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Selain itu, APBDes dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal

128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

c. **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.

2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh sipra-desa (*downroad accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan

unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.

- 3) Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

2. Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang Ekonomi

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik

masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier.

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini terdapat empat indikator tersebut :

1) Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2) Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah

urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan kecepatannya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

3) Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan berupa uang dari pihak ketiga (perorangan) atau suatu badan usaha pada bank, yang dimana penarikan uangnya dapat dilakukan setiap saat dengan media tertentu, tetapi tidak dapat menggunakan biyet giro, cek, ataupun alat-alat lainnya yang sama.

4) Indeks Kualitas Hidup

Indeks kualitas hidup digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada :

- a. Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun.
- b. Angka kematian bayi.
- c. Angka melek huruf.⁸³

3. Pembangunan dalam Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemasyalahatan di dunia dan akhirat. Khurshid Ahmad meletakkan empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu :

1. Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah S.W.T. dan manusia serta manusia dan sesamanya.
2. Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah S.W.T. untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam;
3. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini terkait pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.

⁸³ Sjafrizal, *Op. Cit*, hlm.27

4. Takzkiyyah, misi utama utusan Allah S.W.T. adalah menyucikan manusia dalam hubungan dengan Allah, sesamanya, lingkungannya, masyarakat dan negara.
5. Konsep tauhid meletakkan peraturan-peraturan tentang hubungan Allah S.W.T. dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesama. Konsep rububiyah berarti mengakui sifat Allah S.W.T. sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan bagi menampung dan menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk kearah kesempurnaan.⁸⁴

Berdasarkan dasar-dasar filosofis diatas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut :

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komperhensif dan mengandung unsur spiritual, moral, material. Pembangunan merupakan aktifitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material dunia, tetapi juga akhirat.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan

⁸⁴ Kurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dama Etika Ekonomi Politik*, Risalah Gusti, Surabaya, 2010, hlm.8

fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada mausia.

- c. Pembangunan ekonomi adalah aktifitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah S.W.T. kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya, secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sifat kufur dan zalim.⁸⁵

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pemabnguan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan dimuka bumi ini, yaitu beribadah.⁸⁶ Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri

⁸⁵ *Ibid*, hlm.13

⁸⁶ Ausaf Ahmad, *Economic Development in Islamic Development Revisited dalam Development and Islam, Islamic Perpectives on Islamic Development*, Institute of Objective Studies, New Delhi, 2013.hlm52

termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktifitas pembangunan itu. Pemikiran itu berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah S.W.T. untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada kata 'imarah atau ta'mir sebagai isyarat dalam Q.S Hud ayat 61 :

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

Artinya : "... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..."

kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia di bumi sebagai khalifah.

Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi pada Q.S Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Kalimat ista'ra yang berasal dari kata 'amara mengandung arti permintaan atau perintah dari Allah S.W.T. yang bersifat mutlak agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan dimana ekonomi salah satu dimensinya adalah misi utama penciptaan manusia di muka bumi. Sementara itu, Ahmad Ibn Ali-Al-Jassas melihat Q.S Hud ayat 61 ini dengan dua makna, yaitu makna al-wujud atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah S.W.T. tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata al'imarah (kemakmuran) identik dengan kata at-tanmiyyah al-iqtishadiyyah (pembangunan ekonomi).

Berdasarkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani. Juga berdasarkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segala segi kehidupan, dengan manusia sebagai sentral dari proses pembangunan. Dengan demikian maka sesungguhnya pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan dasar bagi kehormatan atau kemuliaan manusia; baik segi materi, budaya maupun sosial.⁸⁷

4. Indikator-Indikator Pembangunan dalam Ekonomi Islam

Adapun indikator pembangunan ekonomi dapat dilihat dari :

1. Pemeliharaan Agama

Jika pokok-pokok ibadah seperti iman, mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, haji, dan lain-lain, adalah sebagai indikator bagi terpeliharanyakeberadaan agama, maka segala sesuatu mutlak dibutuhkan baik materil maupun non materil, sarana dan jasa untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan realisasi terlebih dahulu.

2. Pemeliharaan Jiwa dan Akal

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa dan akal meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya, kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khilafah).

⁸⁷ Ahmad Ibn Ali Al Jassas dalam Asmuni Mth, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Wawaridi, Edisi X, 2003,hal.131

3. Pemeliharaan Keturunan dan Harta

Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh karenanya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik melalui proses tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan.⁸⁸



⁸⁸ Umar Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Edisi terjemahan*, Gema Insani, Jakarta, 2010, hlm.259.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Natar

Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 26 Desa dengan luas wilayah 253,74 Km², dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik penduduk asli maupun pendatang. Kecamatan Natar berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung

Secara topografis wilayah Kecamatan Natar sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang dari 100 m.

2. Kondisi Demografis

- a. Jumlah Penduduk

Penduduk dari lima desa penelitian Kecamatan Natar berjumlah 65.056 jiwa yang terdiri dari 33.131 jiwa laki-laki dan 31.925 jiwa perempuan yang

menyebar di lima desa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Per Desa Tahun 2017

No.	Desa	Luas (Km ²)	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Hajimena	7,50	9.056	8.998	18.054
2.	Pemanggilan	1,18	4.591	4.383	8.975
3.	Natar	16,15	8.530	8.177	16.707
4.	Merak Batin	3,00	7.991	7.609	15.600
5.	Muara Putih	16,85	2.963	2.758	5.720
Jumlah		44,68	33.131	31.925	65.056

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

b. Fasilitas Ibadah

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk Kecamatan natar adalah Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut :

Tabel 7
Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah

No.	Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1.	Hajimena	16	12	1	-	-
2.	Pemanggilan	12	8	-	-	-
3.	Natar	13	27	2	-	-
4.	Merak Batin	8	5	1	-	-
5.	Muara Putih	9	8	-	-	-
Jumlah		58	60	4	-	-

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

c. Sarana Pendidikan

Tingkat penduduk di lima desa penelitian Kecamatan Natar bervariasi, sebagian penduduk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10.918 jiwa dengan persentase 32,56%, kemudian disusul dengan penduduk SLTP sebanyak 7.752 jiwa dengan persentase 23,12%, SLTA sebanyak 6.766 jiwa dengan persentase 20,18%, Diploma 357 jiwa dengan persentase sebesar 1,25%, dan sarjana sebanyak 482 jiwa dengan persentase 1,70%, dan yang tidak lulus SD sebanyak 2.255 jiwa dengan persentase 7,90%. Tingginya angka dan persentase penduduk yang tidak lulus SD dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : rendahnya perekonomian, dan pengetahuan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	SD	10.918	38,27
2.	SLTP	7.752	27,17
3.	SLTA	6.766	23,72
4.	Diploma	357	1,25
5.	Sarjana	482	1,70
6.	Tidak Lulus SD	2.255	7,90
Jumlah		28.530	100

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

Terdapat beberapa bangunan sekolah dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) yang

berada di Kecamatan Natar. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Banyaknya SD Menurut Jenis Sekolah

No.	Desa	Negeri	Swasta	Madrasyah Ibtidaiyah
1.	Hajimena	2	-	-
2.	Pemanggilan	3	1	-
3.	Natar	4	-	-
4.	Merak Batin	6	-	-
5.	Muara Putih	1	2	-
Jumlah		16	3	-

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar 2017

Dari tabel 9 diatas maka jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 16 sekolah dan Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 3 sekolah.

Tabel 10
Banyaknya SLTP Menurut Jenis Sekolah

No.	Desa	Negeri	Swasta	Madrasyah Tsanawiyah
1.	Hajimena	1	-	-
2.	Pemanggilan	-	2	-
3.	Natar	-	2	-
4.	Merak Batin	1	3	-
5.	Muara Putih	-	2	-
Jumlah		2	9	-

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar 2017

Dari tabel 10 diatas maka jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) negeri berjumlah 2 sekolah dan swasta berjumlah 9 sekolah.

Tabel 11
Banyaknya SLTA Menurut Jenis Sekolah

No.	Desa	SMU	STM	SMK	Madrasyah Aliyah
1.	Hajimena	-	-	1	-
2.	Pemanggilan	2	-	1	-
3.	Natar	1	-	1	-
4.	Merak Batin	-	-	2	-
5.	Muara Putih	2	-	1	-
Jumlah		5	-	6	-

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar 2017

Dari tabel 11 di atas maka jumlah bangunan sekolah SMU berjumlah 5 bangunan dan sekolah SMK berjumlah 6 bangunan.

d. Sarana Kesehatan

Di Kecamatan Natar sarana kesehatan terdapat puskesmas induk, poskesdes, posyandu dll yang dapat membantu masyarakat. Adapun sarana kesehatan di Kecamatan Natar sebagai berikut :

Tabel 12
Banyaknya Sarana Kesehatan

No.	Desa	Puskesmas Induk	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Posyandu
1.	Hajimena	1	-	-	7
2.	Pemanggilan	-	-	2	6
3.	Natar	1	-	1	9
4.	Merak Batin	-	-	-	6
5.	Muara Putih	-	-	1	7
Jumlah		2	-	4	35

No.	Desa	Rumah Bersalin	Praktek Dokter	Praktek Bidan	Balai Pengobatan
1.	Hajimena	-	2	2	-
2.	Pemanggilan	-	-	6	-
3.	Natar	-	1	5	-
4.	Merak Batin	-	2	3	2
5.	Muara Putih	-	-	-	-
Jumlah		-	5	16	2

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

Dari uraian tabel di atas maka terdapat 64 sarana kesehatan yang terdapat di lima desa Kecamatan Natar.

e. Kondisi Perumahan

Data kondisi rumah masyarakat sebagai berikut :

Tabel 13
Kondisi Rumah

No.	Klasifikasi	Desa					Persentase (%)
		Hajimena	Pemanggilan	Natar	Merak Batin	Muara Putih	
1.	Permanen	2.804	1.057	2.685	2.741	565	65,85
2.	Semi Permanen	902	680	889	860	700	26,93
3.	Non Permanen	200	207	246	229	206	7,27
Jumlah		3.906	1.944	3.820	3.830	1471	100

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

Berdasarkan data di atas kondisi rumah masyarakat di Kecamatan Natar yang berjumlah 14.971 rumah, terdiri dari rumah permanen sebesar 65,85%, rumah permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya berbahan genteng. Sedangkan rumah semi permanen sebesar 26,93%, rumah semi permanen

yaitu rumah yang memiliki ciri dindingnya setengah tembok dan setengah bambu, atapnya terbuat dari genteng maupun seng atau asbes. Rumah non-permanen sebesar 7,27%, rumah non permanen memiliki ciri berdinding kayu, bambu, gedek, atau tidak berlantai (lantai tanah), atap rumahnya dari seng maupun asbes.

f. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat di lima desapenelian sebagai berikut:

Tabel 14
Kondisi Perekonomian Masyarakat Tahun 2017

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase
1.	Petani	20%
2.	Pedagang	25%
3.	PNS	20%
4.	TNI/POLRI	10%
5.	Lain-lain	30%
Jumlah		100%

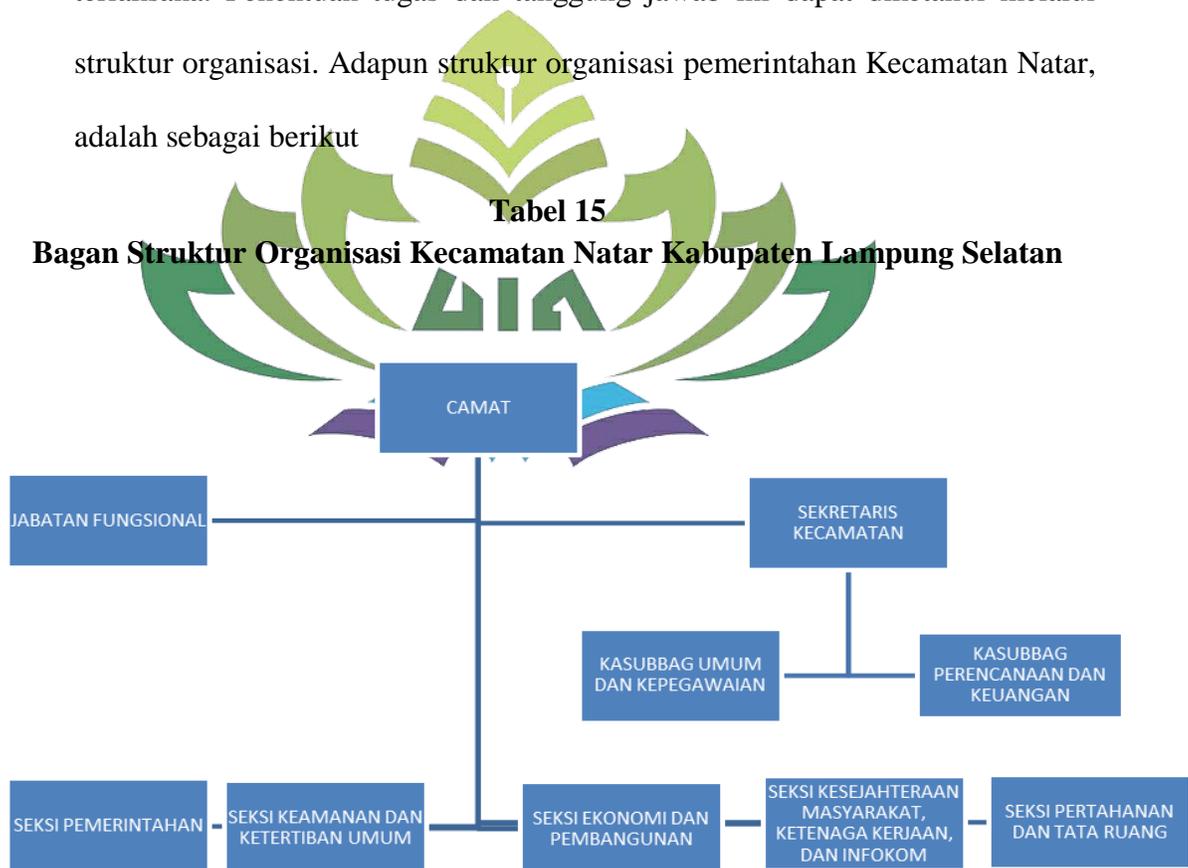
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

Berdasarkan data diatas mayoritas pekerjaan masyarakat di lima desa Kecamatan Natar adalah pedagang yaitu membuka usaha warung kecil dirumah baik menjual sembago, sayuran, dan lain-lain, adapun lainnya membuka usaha warung kelontongan atau berdagang di pasar. Persentase tertinggi 30% yaitu banyaknya wiraswasta, karyawan, buruh serabutan, peternak dan lain-lain.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Natar

Dalam setiap pemerintahan yang baik, harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, agar setiap petugas baik pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga terjadi koordinasi antara petugas satu dengan petugas lainnya akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Natar, adalah sebagai berikut

Tabel 15
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan



B. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pengelolaan Manajemen Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kecamatan Natar merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di desaa agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Desa Hajimena Kecamatan Natar

1) Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Hajimena Kecamatan Natar

Desa Hajimena dalam hal perencanaan APBDes tahun 2017 dimulai direncanakan di tahun 2016 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2017 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2017 disusun dari tahun 2016.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Hajimena Kecamatan Natar, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana

APBDes yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Hajimena yaitu Bapak Rais Yusuf mengenai bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 20% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang

berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”(wawancara 09 april 2018).

2) Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Hajimena Kecamatan Natar

Di Desa Hajimena memiliki luas wilayah seluas 7,50 Km² terdiri dari 7 dusun dan 59 RT. Jumlah penduduk 18.054 jiwa. Desa ini pada tahun 2017 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.388.501.167. Yang diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.908.437.617. dan diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.463.897.688. Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp.500.000, dan Bantuan Provinsi sebesar Rp.13.000.000 sedangkan dari Pendapatan Lain Desa Yang Sah sebesar Rp.2.665.862.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Hajimena digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.415.750.000, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.691.794.000, dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 61.647.688, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.128.465.777, dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 90.843.700. Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran Desa Hajimena Tahun 2017 :

Tabel 16
Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Hajimena

No.	Uraian/Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	463.897.688	-	-
2.	Dana Desa (DD)	908.437.617	-	-
3.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	500.000	-	-
4.	Bantuan Provinsi	13.000.000	-	-
5.	Pendapatan Lain Desa Yang Sah	2.665.862	-	-
6.	Penyelenggaraan Pemerintah	-	415.750.000	29,94
7.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	691.794.000	49,82
8.	Pembinaan Masyarakat	-	61.647.688	4,44
9.	Pemberdayaan Masyarakat	-	128.465.777	9,25
10.	Penyertaan Modal BUMDes	-	90.834.700	6,54
	Jumlah	1.388.501.167	1.388.501.167	99,99

Sumber : Kantor Desa Hajimena Tahun 2017 (*data diolah*)

Melihat uraian diatas, rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah dengan persentase 29,94% dan pelaksanaan pembangunan telah mencapai 49,82% dan pembinaan masyarakat dengan persentase 4,44% serta pemberdayaan masyarakat dengan persentase sebesar 9,25% terakhir penyertaan BUMDes dengan persentase 6,54%. Persentase tertinggi pada pelaksanaan pembangunan sebesar 49,82% artinya pelaksanaan pembangunan Desa Hajimena sudah cukup baik.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2017 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah,

Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17
Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Hajimena

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	229.580.000
2.	Operasional Kantor	65.000.000
3.	Operasional BPD	5.000.000
4.	Operasional LPM	3.000.000
5.	Belanja Modal	81.900.000
6.	Peny.Dok. Perencanaan	8.635.000
7.	Penyusunan Laporan	7.750.000
8.	Musrembang	6.145.000
9.	Biaya Pem. Kes Aparatur	8.740.000
Jumlah		415.750.000

Sumber : Kantor Desa Hajimena Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 18
Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Hajimena

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Aspal	398.689.000
2.	Pembangunan Jalan Paving Blog	266.605.000
3.	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Induk)	26.500.000
Jumlah		691.794.000

Sumber : Kantor Desa Hajimena Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 19
Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Hajimena

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembinaan Kamtibmas	3.400.000
2.	Kegiatan MTQ	5.000.000
3.	Pembinaan Risma	3.500.000
4.	Pembinaan Karang Taruna	3.500.000
5.	Sanggar Seni	7.300.000
6.	Sosialisasi bahaya HIV	5.200.000
7.	Penyelenggaraan TPA	15.790.000
8.	Hari Besar Agama	11.000.000
9.	Pengembangan Olah Raga	6.957.688
Jumlah		61.647.688

Sumber : Kantor Desa Hajimena Tahun 2017 (data diolah)

Tabel 20
Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Hajimena

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pelatihan Perangkat Desa	5.000.000
2.	Pelatihan BPD	3.000.000
3.	Kegiatan PKK	25.000.000
4.	Profil Desa	5.100.000
5.	Pengelolaan Posyandu	19.000.000
6.	Pengelolaan Paud	12.000.000
7.	Pelayanan KB	3.000.000
8.	Lomba Desa	15.000.000
9.	Budidaya	7.000.000
10.	Peternakan	9.400.000
11.	Usaha pertanian	9.965.777
12.	Perpustakaan	15.000.000
Jumlah		128.465.777

Sumber : Kantor Desa Hajimena Tahun 2017 (data diolah)

3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Hajimena Kecamatan Natar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Hajimena dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat

laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Hajimena meliputi :

- a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa .
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
- c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

Bapak Rais Yusuf selaku Kepala Desa Hajimena Kecamatan Natar menjelaskan bahwa:

“Desa sudah memiliki laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. Desa juga sudah memiliki fasilitas sistem informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menempel salinan laporan tersebut di papan pengumuman. Menurut saya, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan secara akuntabilitas.”(wawancara 09 april 2018).

Pernyataan kepala desa tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa yang didiaminya.

2. Desa Pemanggilan Kecamatan Natar

1) Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pemanggilan Kecamatan Natar



Desa Pemanggilan dalam hal perencanaan APBDes tahun 2017 dimulai direncanakan di tahun 2016 atau direncanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2017 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2017 disusun dari tahun 2016.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana APBDes yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku

Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Sekretaris Desa Pemanggilan yaitu Ibu Prihatin Rahayu mengenai bagaimana tahapan APBDes tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

“Proses perencanaan APBDes untuk tahun 2017 itu sudah kami rencanakan dari tahun sebelumnya, begitu juga untuk tahun 2016 yang telah kami rencanakan dari tahun 2015, dan selanjutnya untuk tahun 2018 ini sudah kami rencanakan dari tahun 2017 yang lalu. Setelah rencana kami buat itu masih tetap ada perubahan yang dinamakan APDBes-P.” (wawancara 09 april 2018).

2) Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pemanggilan Kecamatan

Natar

Di Desa Pemanggilan memiliki luas wilayah seluas 1,18 Km² terdiri dari 6 dusun dan 32 RT. Jumlah penduduk 8.975 jiwa. Desa ini pada tahun 2017 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.308.669.568. Yang diperoleh dari

Dana Desa (DD) sebesar Rp.858.018.828. dan diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.437.150.740. Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp.13.500.000.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Hajimena digunakan untuk 4 bidang. Yaitu digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.600.613.100, dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.125.653.798, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.191.301.800, dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 85.801.800, digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.299.580.000. Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran Desa Pemanggilan Tahun 2017 :

Tabel 21
Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Pemanggilan

No.	Uraian/Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	437.150.740	-	-
2.	Dana Desa (DD)	858.018.828	-	-
3.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	13.500.000	-	-
4.	Penyelenggaraan Pemerintah	-	299.580.000	22,99
5.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	600.613.100	46,09
6.	Pembinaan Masyarakat	-	125.653.798	9,64
7.	Pemberdayaan Masyarakat	-	191.301.800	14,68
8.	Penyertaan Modal BUMDes	-	85.801.800	6,58
Jumlah		1.308.669.568	1.302.950.498	99,98

Sumber : Kantor Desa Pemanggilan Tahun 2017 (*data diolah*)

Melihat uraian diatas, rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah dengan persentase 22,99% dan pelaksanaan pembangunan desa telah mencapai 46,09% dan pembinaan masyarakat dengan persentase 9,64% serta pemberdayaan masyarakat dengan persentase sebesar 14,68% terakhir penyertaan BUMDes dengan persentase 6,58%. Persentase tertinggi pada pelaksanaan pembangunan sebesar 46,09% artinya pelaksanaan pembangunan Desa Pemanggilan sudah cukup baik.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2017 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22

Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemanggilan

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	221.710.000
2.	Operasional Perkantoran	37.920.000
3.	Belanja Modal	31.950.000
4.	Operasional BPD	5.000.000
5.	Operasional LPM	3.000.000
Jumlah		299.580.000

Sumber : Kantor Desa Pemanggilan Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 23

Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Pemanggilan

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Aspal	546.760.400
2.	Pembangunan Jalan Paving	53.852.700
Jumlah		600.613.100

Sumber : Kantor Desa Pemanggilan Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 24

Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Pemanggilan

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Peringatan Majelis Taklim	9.400.000
2.	Tadabur Alam ke Pulau Pahawang	10.000.000
3.	Hari Besar Agama	7.950.000
4.	Lomba MTQ	5.000.000
5.	Sunatan Masal	24.000.000
6.	Kegiatan TPA, Honor Guru Ngaji	30.200.798
7.	Keolahragaan Karang Taruna	13.703.000
8.	Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya	6.500.000
9.	Pameran Desa	18.900.000
Jumlah		125.653.798

Sumber : Kantor Desa Pemanggilan Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 25

Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemanggilan

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Kegiatan PKK	25.000.000
2.	Kegiatan Musbangdes	6.800.000
3.	Kegiatan Pelatihan Siskudes	7.300.000
4.	Kegiatan Simultan jamban Keluarga	30.500.000
5.	Kegiatan Sanggar Budaya	15.300.000
6.	Kegiatan Pengelolaan Posyandu	25.700.000
7.	Perpustakaan Desa	15.000.000
8.	Pengelolaan PAUD	14.000.000
9.	Lomba Desa	20.800.000
10.	Kegiatan Pengelolaan Poskesdes	19.000.000
11.	Kegiatan sosialisasi Narkoba	11.901.800
Jumlah		191.301.800

Sumber : Kantor Desa Pemanggilan Tahun 2017 (*data diolah*)

3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Pemanggilan Kecamatan Natar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Pemanggilan dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat

laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Pemanggilan meliputi :

- a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa.
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
- c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

Ibu Prihatin Rahayu selaku Sekretaris Desa Pemanggilan Kecamatan Natar menjelaskan bahwa:

“untuk Desa Pemanggilan setiap laporan keuangan dikerjakan oleh aparaturnya sesuai bidangnya masing-masing dan sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan yang kami buat juga sudah kami serahkan secara lengkap kepada pihak kecamatan”. (wawancara 09 april 2018).

Pernyataan sekretaris desa tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa.

3. Desa Natar Kecamatan Natar

1) Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Natar Kecamatan Natar

Desa Natar dalam hal perencanaan APBDes tahun 2017 dimulai direncanakan di tahun 2016 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2017 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2017 disusun dari tahun 2016.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Natar Kecamatan Natar, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana APBDes yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan

pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang yang telah dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Ketua BPD yaitu Bapak Badrilah mengenai bagaimana tahapan APBDes tahun 2017 dan tingkat ketikutsertaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, yaitu sebagai berikut:

“Proses perencanaan APBDes untuk tahun 2017 itu sudah kami rencanakan dari tahun sebelumnya, dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan namun untuk akhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDes telah disepati seperti yang telah terlaksana. Jika untuk persoalan masyarakat yang ikut serta dalam pengelolan APBDes masih rendah, dikarenakan sewaktu acara kegiatan musrembang masyarakat yang hadir tidak mencapai 50%, hanya kurang lebih 30% dari total yang diundang. Ketidakpedulian mereka dan ketidaktahuan mereka yang kurang mengenai APBDes.”(wawancara 10 april 2018).

2) Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Natar Kecamatan Natar

Di Desa Natar memiliki luas wilayah seluas 16,15 Km² terdiri dari 11 dusun dan 56 RT. Jumlah penduduk 16.707 jiwa. Desa ini pada tahun 2017 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.417.006.402. Yang diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.934.684.185. dan diperoleh dari Alokasi Dana

Desa (ADD) sebesar Rp.468.822.217. dan Bantuan Provinsi sebesar Rp.13.500.000.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Natar digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.416.734.117, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.706.431.627, dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 77.756.158, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.122.616.500, dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 93.468.000. Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran Desa Natar Tahun 2017 :

Tabel 26
Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Natar

No.	Uraian/Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	468.822.217	-	-
2.	Dana Desa (DD)	934.684.185	-	-
3.	Bantuan Provinsi	13.500.000	-	-
4.	Penyelenggaraan Pemerintah	-	416.734.117	29,40
5.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	706.431.627	49,85
6.	Pembinaan Masyarakat	-	77.756.158	5,48
7.	Pemberdayaan Masyarakat	-	122.616.500	8,65
8.	Penyertaan Modal BUMDes	-	93.468.000	6,59
Jumlah		1.417.006.402	1.417.006.402	99,97

Sumber : Kantor Desa Natar Tahun 2017 (*data diolah*)

Melihat uraian diatas, rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah dengan persentase 29,40% dan

pelaksanaan pembangunan desa telah mencapai 49,85% dan pembinaan masyarakat dengan persentase 5,48% serta pemberdayaan masyarakat dengan persentase sebesar 8,65% terakhir penyertaan BUMDes dengan persentase 6,59%. Persentase tertinggi pada pelaksanaan pembangunan sebesar 49,85% artinya pelaksanaan pembangunan Desa Natar sudah cukup baik.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2017 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27
Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Natar

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	259.990.000
2.	Belanja Modal	56.674.117
3.	Operasional BPD	5.000.000
4.	Operasional LPM	3.000.000
5.	Operasional Kantor	66.900.000
6.	Peny.Dok. Perencanaan	5.535.000
7.	Penyusunan Laporan	6.750.000
8.	Biaya Pem. Kes Aparatur	5.145.000
9.	Musrembang	7.740.000
Jumlah		416.734.117

Sumber : Kantor Desa Natar Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 28
Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Natar

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan Aspal	406.543.000
2.	Pembangunan Jalan Paving	299.888.627
Jumlah		706.431.627

Sumber : Kantor Desa Natar Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 29
Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Natar

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembinaan Risma	5.250.000
2.	Sosialisasi Narkoba	7.600.000
3.	Sanggar Budaya	9.100.000
4.	Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	6.800.000
5.	Kegiatan Pertanian	17.506.158
6.	Kegiatan Penyuluhan Rumah Sehat	8.890.000
7.	Karang Taruna	7.000.000
8.	Promosi Produk Unggul	15.610.000
Jumlah		77.756.158

Sumber : Kantor Desa Natar Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 30
Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Natar

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Kegiatan PKK	25.000.000
2.	Kegiatan Musbangdes	5.800.000
3.	Pengelolaan Puskesmas Induk	11.100.000
4.	Sanggar Budaya	8.396.000
5.	Kegiatan Pengelolaan Posyandu	30.400.000
6.	Perpustakaan Desa	15.000.000
7.	Pengelolaan PAUD	7.000.000
8.	Kegiatan Pengelolaan Poskesdes	9.000.000
9.	Kegiatan sosialisasi macam-macam penyakit menular	10.920.500
Jumlah		122.616.500

Sumber : Kantor Desa Natar Tahun 2017 (*data diolah*)

3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Natar Kecamatan Natar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Natar dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat

laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Natar meliputi :

- a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa.
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
- c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

Bapak Badrilah selaku Ketua BPD Desa Natar Kecamatan Natar menjelaskan bahwa:

“Pelaporan yang dilalukann di Desa Natar ini sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak aparaturnya desa walaupun ada keterlambatan dalam pengumpulan laporan. Namun secara garis besar sudah kami laksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan desa.” .”(wawancara 10 april 2018).

Pernyataan Ketua BPD tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa.

4. Desa Merak Batin Kecamatan Natar

1) Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Merak Batin Kecamatan Natar

Desa Merak Batin dalam hal perencanaan APBDes tahun 2017 dimulai direncanakan di tahun 2016 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2017 itu diambil dari perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2017 disusun dari tahun 2016.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Merak Batin Kecamatan Natar, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana APBDes yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan

pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Sekretaris Desa yaitu Bapak Andi Susanto mengenai bagaimana keadaan desa setelah terlaksananya APBDes tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

“APBDes untuk tahun 2017 lebih besar digunakan pada pembangunan infrastruktur desa seperti pengaspalan jalan dan pemasangan paving jalan. Itu karena banyaknya jalan yang masih rusak dan jika hujan itu sangat tidak layak di lewati dikarena banyaknya jalan becek sampai berlubang. Jika keadaan jalan demikian itu sangat menghambat aktifitas warga. Memakan waktu yang lama dari dalam kampung hanya untuk keluar ke jalan raya saja, dikarenakan kerusakan jalan tersebut. Apalagi jika dalam keadaan mendesak itu sangat tidak baik. Maka dari itu pembangunan fisik yang lebih kami perhatikan. Semaksimal mungkin kami optimalkan pembangunan fisik desa. setelah pembangunan fisik desa terlaksana maka terasa sarana prasarana serta keadaan desa lebih cepat mengalami kemajuan.” (wawancara 11 april 2018).

2) Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Merak Batin Kecamatan Natar

Di Desa Merak Batin memiliki luas wilayah seluas 3,00 Km² terdiri dari 7 dusun dan 43 RT. Jumlah penduduk 15.600 jiwa. Desa ini pada tahun 2017 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.467.707.933. Yang diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.980.480.650. dan diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.467.727.283. Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp.13.500.000, dan Bantuan Provinsi sebesar Rp.6.000.000.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Merak Batin digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.408.957.783, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.758.980.650, dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.72.269.500, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.123.500.000, dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 98.000.000. Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran Desa Merak Batin Tahun 2017 :

Tabel 31
Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Merak Batin

No.	Uraian/Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	467.727.283	-	-
2.	Dana Desa (DD)	980.480.650	-	-
3.	Bantuan Provinsi	6.000.000	-	-
4.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	13.500.000	-	-
5.	Penyelenggaraan Pemerintahan	-	408.957.783	27,97
6.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	758.980.650	51,92
7.	Pembinaan Masyarakat	-	72.269.500	4,94
8.	Pemberdayaan Masyarakat	-	123.500.000	8,44
9.	Penyertaan Modal BUMDes	-	98.000.000	6,70
Jumlah		1.467.707.933	1.461.707.933	99,97

Sumber : Kantor Desa Merak Batin Tahun 2017 (*data diolah*)

Melihat uraian diatas, rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah dengan persentase 27,97% dan pelaksanaan pembangunan desa telah mencapai 51,92% dan pembinaan

masyarakat dengan persentase 4,94% serta pemberdayaan masyarakat dengan persentase sebesar 8,44% terakhir penyertaan BUMDes dengan persentase 6,70%. Persentase tertinggi pada pelaksanaan pembangunan sebesar 51,92% artinya pelaksanaan pembangunan Desa Merak Batin sudah baik.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2017 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 32
Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Merak Batin

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Siltap dan Tunjangan	276.560.000
2.	Operasional Perkantoran	67.783.639
3.	Operasional BPD	5.000.000
4.	Operasional LPM	3.000.000
5.	Belanja Modal	34.800.000
6.	Biaya Pem.Kes. Aparatur	9.474.144
7.	Musrembang	3.000.000
8.	Peny.DokPerencanaan	5.000.000
9.	Penyusunan Laporan	4.340.000
Jumlah		408.957.783

Sumber : Kantor Desa Merak Batin Tahun 2017 (data diolah)

Tabel 33

Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Merak Batin

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan onderlag	592.735.000
2.	Rabat Beton / cor	166.245.650
Jumlah		758.980.650

Sumber : Kantor Desa Merak Batin Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 34

Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Merak Batin

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Kegiatan Kamtibmas	19.900.000
2.	Peringatan Hari Besar	13.527.500
3.	Kegiatan Pengajian Majelis Ta'lim	6.000.000
4.	Kegiatan MTQ	5.000.000
5.	Kegiatan Risma	3.982.000
6.	Promosi Produk Unggulan	5.000.000
7.	Keg. Pengembangan Olahraga	13.860.000
8.	Gebyar Kecamatan	5.000.000
Jumlah		72.269.500

Sumber : Kantor Desa Merak Batin Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 35

Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Merak Batin

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pelatihan Perangkat Desa	11.000.000
2.	Kegiatan PKK	25.000.000
3.	Kegiatan Simultan Jamban Keluarga	11.000.000
4.	Keg. Pengelolaan Posyandu	25.000.000
5.	Keg. Pengelolaan PAUD	3.500.000
6.	Profil Desa	10.000.000
7.	Keg. Lomba Desa	15.000.000
8.	Pengembangan WEB	8.000.000
9.	Perpustakaan	15.000.000
Jumlah		123.500.000

Sumber : Kantor Desa Merak Batin Tahun 2017 (*data diolah*)

3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Merak Batin

Kecamatan Natar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Merak Batin dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat

laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Merak Batin meliputi :

- a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa.
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
- c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

5. Desa Muara Putih Kecamatan Natar

1) Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Muara Putih Kecamatan Natar

Desa Muara Putih dalam hal perencanaan APBDes tahun 2017 dimulai direncanakan di tahun 2016 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes tahun 2017 itu diambil dari perencanaan RPJM

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana APBDes 2017 disusun dari tahun 2016.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Muara Putih Kecamatan Natar, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana APBDes yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bendara Desa Bapak Ristio Purnomo mengenai bagaimana pengelolaan APBDes tahun 2017 serta

partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

“Proses pengelolaan APBDes pada tahun 2017 tentu merupakan rencana yang sudah disusun dari tahun sebelumnya, mengenai pembangunan kami masih banyak sekali jalan yang rusak, jadi tentu anggaran itu kami besarkan untuk pembangunan desa seperti aspal dan paving. Itu yang nyata terlihat dan dirasakan dalam waktu yang lama. Serta manfaatnya banyak sekali jika pembangunan desa di laksanakan dalam pembangunan jalan yang layak. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes desa sudah lumayan baik. Kegiatan rapat yang dinamai musrembang tahun 2017 lumayan ramai warga yang datang. Bahkan ada beberapa warga yang menyampaikan aspirasi mereka, mereka bisa di bilang sudah ikut serta dalam berpartisipasi dalam APBDes 2017.”(wawancara 12 april 2018).

2) Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Muara Putih Kecamatan Natar

Di Desa Muara Putih memiliki luas wilayah seluas 16,85 Km² terdiri dari 6 dusun dan 24 RT. Jumlah penduduk 5.720 jiwa. Desa ini pada tahun 2017 mendapat total pendapatan sebesar Rp.1.316.353.380. Yang diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.858.885.225. dan diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.437.342.692. Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp.13.500.000, dan Bantuan Provinsi sebesar Rp.6.000.000 sedangkan Bunga Bank sebesar Rp.625.463.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa di Desa Muara Putih digunakan untuk 4 bidang. Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.387.668.155, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 606.050.000, dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.85.100.000, dan

Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.151.700.000, dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 85.835.225. Berikut merupakan tabel pendapatan dan pengeluaran Desa Muara Putih Tahun 2017 :

Tabel 36
Total Pendapatan dan Pengeluaran Desa Muara Putih

No.	Uraian/Kegiatan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	437.342.692	-	-
2.	Dana Desa (DD)	858.885.225	-	-
3.	Bantuan Provinsi	6.000.000	-	-
4.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	13.500.000	-	-
5.	Bunga Bank	625.463	-	-
6.	Penyelenggaraan Pemerintah	-	387.668.155	29,45
7.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	606.050.000	46,04
8.	Pembinaan Masyarakat	-	85.100.000	6,46
9.	Pemberdayaan Masyarakat	-	151.700.000	11,52
10.	Penyertaan Modal BUMDes	-	85.835.225	6,52
Jumlah		1.316.353.380	1.316.353.380	99,99

Sumber : Kantor Desa Muara Putih Tahun 2017 (*data diolah*)

Melihat uraian diatas, rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah dengan persentase 29,45% dan pelaksanaan pembangunan desa telah mencapai 46,04% dan pembinaan masyarakat dengan persentase 6,46% serta pemberdayaan masyarakat dengan persentase sebesar 11,52% terakhir penyertaan BUMDes dengan persentase 6,52%. Persentase tertinggi pada pelaksanaan pembangunan

sebesar 46,04% artinya pelaksanaan pembangunan Desa Muara Putih sudah cukup baik.

Untuk penggunaan pendapatan dana desa pada tahun anggaran 2017 dibagi menjadi empat bidang yaitu Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III Pembinaan Masyarakat, dan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37
Realisasi Bidang I Penyelenggaraan Pemerintah Desa Muara Putih

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Siltap dan Tujangan	229.580.000
2.	Operasional Perkantoran	55.468.155
3.	Operasional BPD	5.000.000
4.	Operasional LPM	3.000.000
5.	Belanja Modal	76.900.000
6.	Biaya Pem. Kes. Aparatur	6.720.000
7.	Musrembang	3.000.000
8.	Peny. Dok. Perencanaan	3.000.000
9.	Penyusunan Laporan	5.000.000
Jumlah		387.668.155

Sumber : Kantor Desa Muara Putih Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 38
Realisasi Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa Muara Putih

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembangunan Onderlag	418.458.000
2.	Perkerasan Jalan Paving	187.592.000
Jumlah		606.050.000

Sumber : Kantor Desa Muara Putih Tahun 2017 (*data diolah*)

Tabel 39
Realisasi Bidang III Pembinaan Masyarakat Desa Muara Putih

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pembinaan Kamtibmas	3.400.000
2.	Keg. Pem. Lahan Pekarangan	4.000.000
3.	Peringatan Hari Besar	10.000.000
4.	Pembinaan Risma	3.500.000
5.	Kegiatan MTQ	5.000.000
6.	Khitanan Massal	10.000.000
7.	Penyelenggaraan TPA	12.200.000
8.	Sanggar Seni	6.000.000
9.	Pendataan ADM KPDDKN	5.000.000
10.	Promosi Produk Unggul	10.000.000
11.	Pengembangan Olah Raga	7.000.000
12.	Sosialisasi HIV dan Narkoba	4.000.000
13.	Gebyar Kecamatan	5.000.000
Jumlah		85.100.000

Sumber : Kantor Desa Muara Putih Tahun 2017 (data diolah)

Tabel 40
Realisasi Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Putih

No.	Uraian/Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1.	Pelatihan Perangkat Desa	5.000.000
2.	Pelatihan BPD	3.000.000
3.	Program PKK	25.000.000
4.	Pelatihan LPM	2.000.000
5.	Pengelolaan Posyandu	19.000.000
6.	Pengelolaan PAUD	12.200.000
7.	Pengelolaan STBM/ Swasembada WC	15.000.000
8.	Pelayanan KB. Kes Ibu dan Anak	3.500.000
9.	Profil Desa	5.000.000
10.	Pelatihan Kepemudaan	5.000.000
11.	Lomba Desa	15.000.000
12.	Pengembangan WEB	3.500.000
13.	Budidaya Ikan	9.000.000
14.	Peternakan	9.500.000
15.	Usaha Pertanian	5.000.000
16.	Perpustakaan	15.000.000
Jumlah		151.700.000

Sumber : Kantor Desa Muara Putih Tahun 2017 (data diolah)

3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Muara Putih

Kecamatan Natar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Desa Muara Putih dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDes yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat

laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di Desa Muara Putih meliputi :

- a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan dana, dan realisasi belanja dana desa.
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
- c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

C. Kondisi Masyarakat di Lima Desa Kecamatan Natar

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di lima desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

1. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak bergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Masyarakat di lima desa Kecamatan Natar jika di tinjau melalui latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan kejenjang SMA, dan Strata satu (S1). Tetapi hampir 32% dari kelima desa Kecamatan Natar berpendidikan setingkat SMA. Faktor anak sekolah dikarenakan orang tua tidak menganjurkan disebabkan faktor ekonomi dan juga tidak ada keinginan dari anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, mereka hanya ingin cepat mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat di limadesa Kecamatan Natar :

Tabel 41
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1.	Penduduk usis 10 tahun keatas buta huruf	-
2.	Penduduk tidak tamat SD	-
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	3.200
4.	Penduduk tamat SMP	2.624
5.	Penduduk tamat SMA/ sederajat	5.167
6.	Penduduk tamat Diploma	1.023
7.	Penduduk tamat Sarjana	4.055

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

Tingginya warga yang berlatar belakang pendidikan SMA atau sederajat, membuat pengetahuan masyarakat mengetahui akan pentingnya pendidikan. Akan tetapi berpenghasilan rendah membuat warga takut untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Warga yang berpendidikan Sarjana di antaranya adalah anak-anak pemilik sawah, pemilik kebun, PNS, POLRI dan lain-lain.

2. Tingkat kesehatan masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antara negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari : indikator kesehatan (umur harapan hidup lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) secara ekonomi (pengeluaran riil perkapita).⁸⁹ Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi :

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100kkal/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.

⁸⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia, hlm.11

3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawatan.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah umur harapan hidup lahir. Namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana cara meningkatkan umur hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur hidup waktu lahir.

Hal ini ditegaskan dengan banyaknya posyandu, posekesdes bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kekurangan gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat dalam pemenuhan gizi yang sudah tercukupi selain itu masyarakat dalam penanganan bayi sudah tidak menggunakan tabib atau dukun bayi ini dikarenakan akses jalan menuju puskesmas semakin mudah. Dan kemajuan zaman yang mudah mengakses internet maka masyarakat dapat mudah mengakses informasi-informasi mengenai kesehatan.

3. Tingkat pendapatan masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun, pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Adapun besarnya pendapatan masyarakat dari lima desa menurut profesi pekerjaannya sebagai berikut :

Tabel 42
Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2013

No.	Jenis Profesi	Pendapatan yang diperoleh/bulan
1.	Petani	Rp. 2.000.000 – 3.000.000
2.	Buruh	Rp. 1.500.000
3.	Pedagang	Rp. 1.900.000

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan ADD tahun 2013. Pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan sekalipun dana alokasi desa tiap tahun bertambah.

Tabel 43
Pendapatan Rata-rata Pendudukan Tahun 2017

No.	Jenis Profesi	Pendapatan yang diperoleh/bulan
1.	Petani	Rp. 2.500.000 – 3.000.000
2.	Buruh	Rp. 1.700.000
3.	Pedagang	Rp. 2.000.000

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar

Dari kedua tabel diatas terlihat jelas pendapatan masyarakat tidak mengalami perubahan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa kurang dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Komposisi Pengeluaran Masyarakat

Pada usia menengah, pada usia tua maka rasio tabungan akan konsumsi masyarakat mendasarkan kenyataan bahwa pola-pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Kerena orang cenderung menerima penghasilan/pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda akan mempunyai tabungan yang negatif

(*dissaving*), orang menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah.⁹⁰

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalantersebut adalah upah, sewa, bunga, deviden, dan laba merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.⁹¹

Pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi pada umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting kerana makanan merupakan barang utama untuk keberlangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

⁹⁰ Dewa candra Kusuma, *Aplikasi Manajemen Portofolio Menggunakan MAD Algoritma Titik Interior*, 2008.

⁹¹ Komponen dan Devisi Komposisi Pengeluaran Masyarakat, (online), tersedia di Bps.go.id, 20 Februari 2016.

Hasil wawancara penulis dengan seluruh kepala desa di lima desa Kecamatan Natar, kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan yang tidak menentu menjadi salah satu faktor beberapa porsi pengeluaran yang dikeluarkan perharinya. Jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka sedikit maka kebutuhan makan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi sekitar Rp. 20.000 perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lainnya.⁹²

Menurut perhitungan Biro Pusat Statistik konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan maupun perumahan. Berikut merupakan tabel pola konsumsi masyarakat :

Tabel 44
Pola Konsumsi Masyarakat

No.	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1.	Pengeluaran makanan	600.000
2.	Pengeluaran pendidikan	550.000
3.	Pengeluaran kesehatan	450.000
Total Pengeluaran (Rp)		1.600.000

Sumber : Hasil kesimpulan wawancara dengan lima kepala desa Kecamatan Natar

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dibanding konsumsi perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga masyarakat harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan.

⁹² Data diperoleh dari hasil kesimpulan penulis dengan lima kepala desa Kecamatan Natar.

5. Tingkat perumahan masyarakat

Menurut WHO, rumah atau stuktur fisik bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu.⁹³ Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, ketersediaannya listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya, perumahan memberikan kesan tentang rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya.⁹⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa, perumahan merupakan suatu lingkungan sebagai tempat, struktur fisik atau bangunan untuk berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik kesehatan keluarga dan individu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan tabel tentang tingkat perumahan masyarakat :

⁹³ Pengertian Perumahan, (online), tersedia di <http://id.shvoong.co.id>, 25 Desember 2015.

⁹⁴ *Ibid.*

Tabel 45
Tingkat Perumahan Masyarakat

No.	Indikator Perumahan Masyarakat	Tahun 2013	Tahun 2017
1.	Kepemilikan Rumah	Hak Milik	Hak Milik
2.	Rumah berkualitas baik	75%	90%
3.	Rumah tangga mempunyai penerangan listrik	100%	100%
4.	Rumah tangga mempunyai MCK yang baik	80%	100%

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Natar Tahun 2017

Dari tabel diatas jelas menunjuk bahwa program alokasi dana desa berdampak positif jika dilihat dari naiknya persentase dari tingkat penerangan listrik dan rumah tangga mempunyai MCK yang baik.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut UU No 09 tahun 2015 desa, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang dilakukan dengan adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien.

Kemudian bila dilihat dari tujuannya, dana desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah, pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah sejalan dengan hal ini pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsinya masing-masing terutama terutama fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.⁹⁵

Dari data yang dihimpun penulis diketahui bahwa besaran total pendapatan desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mendapat besaran dana berkisar antara Rp.1.300.000.000 - Rp1.470.000.000 per desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sedangkan

⁹⁵ Ani Sri Rahayu, *Loc. Cit.*

penggunaan dana desa di Kecamatan Natar ini digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah seperti belanja pegawai, operasional perkantoran, operasional LPM, operasional BPD, musrembang yang setiap desa memiliki kesamaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, untuk yang lainnya sesuai dengan rencana yang akan diselenggarakan oleh masing-masing desa.

Bidang pembangunan desa, dari ke lima desa sama-sama digunakan untuk perbaikan pembangunan jalan, pembangunan jalan paving block dan jalan aspal dikarenakan masih banyaknya jalan yang rusak, itu pun pembangunan desa tidak sampai 55% dalam pembangunan desa tidak ada desa yang membangun jembatan, pembangunan siring, dan pembangunan sumur bor.

Bidang pembinaan masyarakat seperti pembinaan Kamtibmas, kegiatan MTQ, pembinaan Risma, pembinaan kegiatan karang taruna, sanggar seni, sosialisasi yang berbeda-beda di setiap desa, penyelenggaraan TPA, hari besar agama, pengembangan olah raga, sunatan massal, pameran desa, pertanian, promosi produk unggul, pembinaan ketertiban, pembinaan pekarangan rumah, pembinaan KB dan lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat seperti, pelatihan perangkat desa, pelatihan BPD, Kegiatan PKK, pengelolaan posyandu, pengelolaan PAUD, pengelolaan puskesmas induk, pelayanan KB, Perpustakaan desa, musrembang, lomba desa, sanggar budaya dan lainnya.

Terkait proses perencanaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Hajimena, Desa Pemangilan, Desa Natar, Desa Merak Batin, Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Desa terlebih dahulu

menyusun tim pelaksanaan yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa masih kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran APBDes serta bagaimana proses pengelolaan APBDes, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan dana desa, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

Pada tahapan pelaksanaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini penggunaannya sudah terfokus pada pembangunan desa yaitu pada perbaikan jalan rusak yang sudah di perbaiki melalui pembangunan jalan aspal dan jalan paving block. Namun pembangunan yang telah dilaksanakan hanya satu desa

yang sudah mencapai 50% yaitu Desa Merak Batin dengan persentase 51,92%, sedangkan yang lainnya seperti Desa Hajimena hanya 49,82%, Desa Pemanggilan dengan persentase 46,09%, Desa Natar dengan persentase 49,85%, sedangkan Desa Muara Putih dengan persentase sebesar 46,04%. Dengan pengeluaran bidang pembangunan berkisar antara Rp.600.000.000-Rp.760.000.000, untuk Desa Hajimena sebesar Rp.691.794.000, Desa Pemanggilan sebesar Rp.600.613.100, Desa Natar sebesar Rp.706.431.627, Desa Merak Batin sebesar Rp.758.980.650, sedangkan untuk Desa Muara Putih sebesar Rp.606.050.000.

Pengelolaan dana desa sudah ditetapkan untuk memenuhi empat bidang, maka dari itu untuk bidang pembangunan sudah memiliki persentase yang lebih tinggi dari tiga bidang lainnya, walaupun tidak mencapai 55% dalam bidang pembangunan itu dikarenakan keterbatasan dana yang ada sehingga dana keseluruhan tidak dapat dipakai untuk pembangunan desa saja, selain terkendala karena dana yang kurang memadai, dana juga di fokuskan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.220.000.000 – Rp.420.000.000. seperti Desa Hajimena sebesar Rp.415.750.000, Desa Pemanggilan sebesar Rp.299.580.000, Desa Natar sebesar Rp.416.734.117, Desa Merak Batin sebesar Rp.408.957.783, dan Desa Muara Putih sebesar Rp.387.668.115.

Selanjutnya Pembinaan kemasayarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasayarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat,

lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.⁹⁶ Pembinaan kemasyarakatan di Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah terlaksana dengan pencapaian sekitar 4% - 10%. Dengan uraian Desa Hajimena dengan persentase sebesar 4,44%, Desa Pemanggilan dengan persentase sebesar 9,64%, Desa Natar dengan persentase sebesar 5,48%, Desa Merak Batin dengan persentase sebesar 4,94%, sedangkan Desa Muara Putih dengan persentase sebesar 6,46%. Dari penjelasan diatas persentase yang tertinggi dalam pembinaan kemasyarakatan yaitu pada Desa Pemanggilan dengan 9,64% persen.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁹⁷

Pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah terlaksana dengan pencapaian sekitar 8% - 15%. Dengan uraian Desa Hajimena dengan persentase sebesar 9,25%, Desa Pemanggilan dengan persentase sebesar 14,68%, Desa Natar dengan persentase sebesar 8,65%, Desa Merak Batin dengan persentase sebesar 8,44%, sedangkan Desa Muara Putih dengan persentase sebesar 11,52%. Dari penjelasan diatas persentase yang

⁹⁶ Amin Jaya, *Program Pembinaan Masyarakat*, <http://www.aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat>, pada tanggal 16 April 2018, pukul 20:13.

⁹⁷ <http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-des-11/> pada tanggal 16 April 2018, pukul 20:48.

tertinggi dalam pemberdayaan kemasyarakatan yaitu pada Desa Pemanggilan dengan 14,68% persen.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembangunan berjalan dengan baik namun, tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Setiap jajaran anggota perangkat desa memiliki tanggungjawab sesuai dengan visi dan misi desa tersebut. Pertanggungjawaban itu berupa pelaksanaan pengelolaan dana yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan dapat ditunjukkan hasilnya.

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kecamatan Natar sudah cukup efektif walaupun adanya keterlambatan dalam mengumpulkan hasil laporan pertanggungjawaban, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah disusun sendiri oleh pemerintah Desa serta adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Jika dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dana desa di lima desa Kecamatan Natar tujuan dan fungsi program alokasi dana desa belum tersentuh secara menyeluruh, dari tujuan alokasi dana desa yang baru dapat dirasakan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial, bidang kesehatan, dan terlihat pula dari program ibu PKK dan lain-lain, dan penyelenggaraan pemerintah seperti belanja alat kantor desa, renovasi kantor desa dan lain-lain. Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan dari program alokasi dana desa ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan infrastruktur. Sedangkan dalam peningkatan pendapatan belum tercapai karena aparatur desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum memprioritaskan kegiatan ekonomi kreatif sebagai salah satu program alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian dari tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan pengelolaan dan tahap pertanggungjawaban seharusnya terdapat monitoring yang dilakukan untuk melihat hasil dari kegiatan yang dilakukan, seharusnya pembangunan tidak berfokus pada pembangunan fisik saja berupa pembangunan jalan, namun seharusnya membesarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakatnya. Karena pemberdayaan masyarakat dapat memacu peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat berkembang dan maju bila diberdayakan dengan tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat pula mengukur peran dana desa dalam pembangunan di lima desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah

suatu keadaan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat karena program Alokasi Dana Desa keuangan, maka berdasarkan hal tersebut data-data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Masyarakat di lima desa Kecamatan Natar jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang melanjutkan kejenjang SMA, S1, S2. Tetapi hampir 32% dari masyarakat di lima desa Kecamatan Natar berpendidikan SMA. Dampak dari penyelenggaraan dana desa di bidang pendidikan belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Natar ini dikarenakan pengalokasian dana tersebut belum dialokasikan ke bidang pendidikan.

Sekalipun dari program dana desa belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi tidak menjadikan masyarakat putus sekolah dikarenakan banyaknya sekolah terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan adanya biaya pendidikan dikenal tidak mahal karena mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Dari program dana desa untuk kesehatan masyarakat sudah adanya sosialisasi HIV, sosialisasi bahaya narkoba, simultan jamban keluarga, pengelolaan posyandu, pengelolaan poskesdes, tersebut tentu saja dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sehat. Selain itu juga dengan sarana kesehatan yang ada masyarakat dalam penanganan ibu melahirkan sudah tidak menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian bayi dan ibu melahirkan tidak ada, serta masyarakat memiliki gangguan kesehatan lebih memilih berobat kepuskesmas atau poskesdes.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Menurut SKPMP 2009 tingkat pendapatan perbulan dikatakan sejahtera adalah lebih dari Rp.500.000

Adanya program alokasi dana desa ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini dikarenakan pengelolaan alokasi dana tidak memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seharusnya dari program alokasi dana desa tersebut digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

4. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makan akan jauh lebih kecil di bandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu, tidak membuat masyarakat memperkecil atau menambah pengeluaran. Jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka sedikit maka kebutuhan makan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp.20.000. ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lainnya.

Karena program alokasi dana desa ini belum menyentuh ekonomi kreatif masyarakat sehingga alokasi dana desa ini belum dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat secara keseluruhan, karena ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat maka otomatis tidak akan berpengaruh juga terhadap komposisi pengeluaran masyarakat.

5. Tingkat infrastruktur masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat 65% permanen, 25% semi permanen dan 10% adalah non permanen. Sedangkan MCK warga sudah baik karena setiap rumah sudah memiliki sanitasi yang baik. Kondisi sumner air bersih juga sudah dikatakan baik. Dan untuk penerangan listrik juga setiap rumah sudah memakai listik. Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga sudah dapat dikatakan sejahtera karena sudah memenuhi ketegori sejahtera. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat sudah dijelaskan diatas, telah menunjukan bahwa alokasi dana desa berdampak positif pada masyarakat sekitas, seperti masyarakat tidak harus ke sungai karena sudah baiknya MCK.

B. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani. Juga berdasarkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segala segi kehidupan, dengan manusia sebagai sentral dari proses pembangunan. Dengan demikian sesungguhnya pembangunan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehormatan dan kemuliaan manusia, baik dari segi materi, budaya maupun sosial.

Sebenarnya konsep pembangunan ekonomi Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (*driving force*) pembangunan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia merangkum seluruh potensi dan keberdayaan, kualitas manusia dari sudut materi, spiritual dan moral. Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem keuangan dan dasar perniagaan secara adil.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai Khalifah yang di amanahkan oleh Allah S.W.T untuk mengelola bumi

sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan merujuk pada data yang telah penulis sajikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya terlaksana, hal ini bila berdasarkan indikator dan tujuan dalam ekonomi Islam adalah :

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan Islam. Dalam pengelolaan manajemen dana desa sudah terdapat empat bidang, yang di antaranya dua bidang sudah di tujukan untuk masyarakat yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan kulturalnya. Berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Dalam pengelolaan tidak hanya pembangunan fisik saja yang dilakukan namun juga membangun masyarakat agar memiliki pengetahuan yang berkembang serta bermanfaat. Yaitu dengan adanya sosialisasi yang sudah dilakukan dalam pengelolaan dana desa yang berhubungan langsung kepada masyarakat.

3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.

Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi ketimpangan pembangunan dibergabagi sektor dan wilayah.

Berdasarkan data hasil penelitian yang menunjukkan dari beberapa aspek, aspek infrastruktur dan sosial serta sumberdaya manusia diantaranya : aspek kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan pendapatan masyarakat semua itu belum terlaksana secara baik atau kurang dari sejahtera, adapun peningkatan dibidang pendidikan hal itu berdasarkan karena bantuan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khilafah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi. Kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Sebagaimana dalam Q.S Hud ayat 61 :

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ

مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : "... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".⁹⁸

Motivasi ekonomi Islam juga dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agamanya.⁹⁹ Dengan kesejahteraan yang memadai dan merata akan munculefek-efek positif seperti solidaritas dan ketahanan sosial, komitmen yang kuat terhadap agama, ketahanan dan stabilitas ekonomi dan politik, dan sebagainya.

Menurut Rasulullah S.A.W. stabilitas itu muncul apabila terpenuhi segala kebutuhan manusia baik fisik maupun psikis. Rasulullah S.A.W. bersabda :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَفَتَّحَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

“Dari Abd. Allah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash abhwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda, “Sungguh beruntung orang yang beragama Islam, diberi rizeki yang cukup, dan merasa puas dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah.” (HR.Muslim)

Rezeki yang cukup diimbangi dengan sikap menerima terhadap nikmat dan karunia Allah dengan cara mensyukuri serta tidak bersikap rakus akan menciptakan stabilitas ekonomi yang pada giliran berikutnya juga akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi desa dan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Kondisi umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Hadits diatas adalah umat yang sejahtera lahir dan batin.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*

⁹⁹ Mahmud al-Rubi, “al-Manhaj al-Islami fi al-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah wa al-Ijtimaiyyah,” dalam *Majallah al-Dirasah al-Tijariyyah wa al-Islamiyyah*, Nomor 3 Tahun ke-1 Juli 1984 M., hlm31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besar daripada tiga bidang lainnya. Bidang pembangunan desa lebih besar anggaran maupun persentasenya dibanding dengan bidang penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Total pendapatan desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mendapat besaran dana berkisar antara Rp.1.300.000.000 - Rp1.470.000.000 per desa. Dengan pengeluaran bidang pembangunan berkisar antara Rp.600.000.000- Rp.760.000.000, untuk Desa Hajimena sebesar Rp.691.794.000, Desa Pemanggilan sebesar Rp.600.613.100, Desa Natar sebesar Rp.706.431.627,

Desa Merak Batin sebesar Rp.758.980.650, sedangkan untuk Desa Muara Putih sebesar Rp.606.050.000.

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kecamatan Natar sudah cukup efektif walaupun adanya keterlambatan dalam mengumpulkan hasil laporan pertanggungjawaban, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah disusun sendiri oleh pemerintah Desa serta adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat

2. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Pengelolaan Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Lima Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan ekonomi Islam maka belumlah dapat dikatakan baik menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi ini. Sebagaimana ditegaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

B. Saran

Dari uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi, dan peningkatan proram pembangunan yang lebih baik lagi.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini kiranya penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana

desa agar dapat tepat guna dan mencapai apa yang telah di amanatkan Undang-Undang dengan anggaran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin Jaya, *Program Pembinaan Masyarakat*,
<http://www.aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat>.
pada tanggal 16 April 2018, pukul 20:13.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, PT. Bumi Prakasa, Jakarta, 2010.
- Ahmad Ibn Ali Al Jassas dalam Asmuni Mth, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Wawaridi, Edisi X, 2003
- Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Astellia Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomer 3, 2015.
- Ausaf Ahmad, *Economic Development in Islamic Development Revisited dalam Development and Islam, Islamic Perspectives on Islamic Development*, Institute of Objective Studies, New Delhi, 2013.
- Badrudin Rudy, *Ekonomika Ekonomi Daerah*, UPP Stim YKPN, Yogyakarta, 2012
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Keuangan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Chabib Soleh, Heru Rocmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung, Fokus Media, 2014
- Cholid Nuroboko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Bandung, 2005

Dewa candra Kusuma, *Aplikasi Manajemen Portofolio Menggunakan MAD Algoritma Titik Interior*, 2008.

George R Terry Alih Bahasa Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, PT Alumni, Bandung, 2006

Haryati, Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, JOM FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

<http://digilib.unila.ac.id/13040/8/IV.pdf> , pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 19:59 WIB.

<http://bumdes.id/blog/2017/12/11/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-desa-11/> pada tanggal 16 April 2018, pukul 20:48.

I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Yogyakarta : CV Andi Offset, edisi 1.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.

Kalimandhanu, Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume Nomor, 2014 : 2008 - 2022

Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika Jakarta, 2002.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

Komponen dan Devisi Komposisi Pengeluaran Masyarakat, (online), tersedia di Bps.go.id, 20 Februari 2016.

Kurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi Politik*, Risalah Gusti, Surabaya, 2010

- Mahmud al-Rubi, “al-Manhaj al-Islami fi al-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah wa al-Ijtimā’iyyah,” dalam *Majallah al-Dirasah al-Tijariyyah wa al-Islamiyyah*, Nomor 3 Tahun ke-1 Juli 1984 M.
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta , 2004.
- Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
- M. Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung Pustaka Setia, 2010.
- M. Iqbal Hasan, *Analisis Data dan Penelitian dengan Statistik*, PT. Bumi Aksara, Bandung, 2006.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 2*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution El. At, *Pengendalian Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nasution, *Metodelogi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*.
- Ni Made Ayu Andriani, Dr.Dra.Joyce. J. Rares, M.Si, Drs. Gustaaf Buddy Tampi, M.Si, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow*.
- Noor Juiansyah, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta Kencana, 2013.
- Pengertian Perumahan, (online), tersedia di <http://id.shvoong.co.id>, 25 Desember 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Deaa pasal 97 ayat 2.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English*, Jakarta, 1999.

- Priyo Sambodo, Implementasi Dana Bantuan Pt. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2 , 2014.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Ricky W Griffin, Ronald J Ebert, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Riken Kalalo, Ronny Gosal, Josef Kairupan, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi Di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)*.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2013.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika Jakarta, Jakarta, 1999.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2014.
- Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yayasan Pendidikan Fakultas Sikologi UGM, Yogyakarta, 2012.
- Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat 1 dan 4.
- Umar Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Edisi terjemahan*, Gema Insani, Jakarta, 2010.

Usman Hunaini, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 4, Bumi Aksara, 2008.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar metodetchnik*, Tarsindo, Ed,7. Bandung, 2000.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jalan Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung
Phone: (0721) 780887

PEDOMAN DOKUMENTASI

Nama : Savarita Pitri
NPM : 1451010249
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Lima Desa di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Keadaan Umum Kecamatan Natar

1. Kondisi Geografis Kecamatan Natar
2. Kondisi Demografis Lokasi Penelitian
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Natar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jalan Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung
Phone: (0721) 780887

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Savarita Pitri
NPM : 1451010249
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Lima Desa di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

A. Manajemen Dana Desa

1. Apakah dalam tahap manajemen perencanaan sudah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi ?
2. Apakah dalam pengelolaan manajemen dalam tahap-tahap perencanaan terdapat kendala ?
3. Apakah dalam tahap pengorganisasian telah sesuai dengan fungsinya masing-masing ?
4. Apakah dalam pengendalian pengelolaan manajemen dana desa terdapat hambatan atau kendala ?
5. Apakah penempatan pengelolaan dana desa sudah sesuai bidangnya ?
6. Apakah proses pengarahan yang dilakukan sudah efektif dan efisien ?

7. Apakah ada cara yang dilakukan oleh aparat dalam meningkatkan motivasi masyarakat terhadap kepedulian dalam membangun desa ?
8. Apakah pada tahap pertanggung jawaban dan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat ?

B. Pembangunan Desa

1. Apakah bapak/ibu merasakan perubahan dalam pembangunan yang telah dilakukan oleh desa ?
2. Apakah pembangunan yang dilakukan sudah dapat mensejahterakan masyarakat ?
3. Apakah pembangunan dalam pandangan Islam sudah terlaksana sesuai dengan syariat Islam ?
4. Apakah dana desa berperan penting dalam pembangunan kebudayaan desa ?
5. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan bapak/ibu sebagai masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa ?
6. Apakah dengan adanya dana desa sarana dan prasarana sosial semakin membaik ?
7. Dengan adanya dana desa apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
8. Dengan adanya dana desa apakah sudah menyentuh pada bidang ekonomi kreatif dan pada bidang pendidikan ?